

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



REVISI KE- 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHA TINA, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 07 November 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

IKHA TINA, S.H., M.Hum

REVISI KE- 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	85
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	82
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 7.521.997.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 196.650.800,-
3. Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara	Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 07 November 2025

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



IKHA TINA, S.H., M.Hum

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H